

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT) TAHUN 2022
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MEDAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Medan, 2022

**Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MEDAN**



**Drs. RIDWAN SITANGGANG
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660501 198603 1 005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 OPD Tahun 2021 5
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 5

BAB III. PENUTUP 9

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD 2022 merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan opd menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang tenaga kerja dan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas ketenagakerjaan Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketrasmigrasian. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketrasmigrasian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketrasmigrasian

- d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang – undangan.
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 22. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
 23. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjamin kegiatan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran serta menjamin tercapainya tujuan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah:

- a. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dicapai, serta program prioritas pembangunan daerah;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Mendokumentasikan proses evaluasi renstra secara periodik.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT OPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2021.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2022 memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2022. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA OPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi OPD.
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akandatang.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun Anggaran 2021, terdapat 4 program dan 14 kegiatan serta 29 sub kegiatan, yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 17.141.064.228,- (tujuh belas milyar seratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan jumlah program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dapat mengerjakan 14 kegiatan yang dilaksanakan dan dengan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 13.821.909.936,- (tiga belas milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) atau sebesar 80,64%.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi secara global, seperti reformasi pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan harus mampu menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Untuk memberikan gambaran serta wajah masa depan yang didambakan, yang akan menentukan arah masa depan yang realistis dan terukur, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mendukung visi Pemerintah Kota Medan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”.

Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Misi yang berkaitan dengan Dinas Ketenagakerjaan, antara lain :

1. Medan Maju

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua

2. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya.

Dengan adanya Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mendukung serta mewujudkan visi dan misi tersebut dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2022, antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dijabarkan secara rinci kedalam beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- I.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :
 - I.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- I.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :
 - I.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - I.2.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- I.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :
 - I.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - I.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- I.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :
 - I.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - I.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - I.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - I.4.4. Penyediaan Bahan/Material
 - I.4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - I.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - I.4.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- I.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :
 - I.5.1. Pengadaan Mebel
 - I.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- I.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :
 - I.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - I.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - I.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- I.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :
 - I.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - I.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - I.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - I.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dijabarkan secara rinci kedalam beberapa kegiatan, sebagai berikut:

II.1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

II.1.1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

II.1.2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

II.2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

II.2.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

II.3. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

II.3.1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program penempatan tenaga kerja dijabarkan secara rinci kedalam beberapa kegiatan, sebagai berikut :

III.1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

III.1.1. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

III.1.2. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

III.2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

III.2.1. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online

III.2.2. Job Fair/Bursa Kerja

III.3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

III.3.1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekeja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).

III.4. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :

III.4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketenagakerjaan)

IV. Program Hubungan Industrial

Program hubungan industrial dijabarkan secara rinci kedalam beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- IV.1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :
- IV.1.1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - IV.1.2. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
 - IV.1.3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- IV.2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibagi kedalam sub kegiatan, antara lain :
- IV.2.1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - IV.2.2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - IV.2.3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - IV.2.4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - IV.2.5. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

**Plt. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MEDAN**



**Drs. RIDWAN SITANGGANG
PEMBINA Tk. I
NIP. 19660501 198603 1 005**

LAMPIRAN

LAMPIRAN I RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon II TAHUN 2022

OPD : Dinas Ketenagakerjan Kota Medan

Tahun : 2022

Sasaran Strategis	Kinerja		
	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Tenaga Kerja Bersertifikat	Persentase Pencari Kerja/ Tenaga Kerja yang Memperoleh Sertifikat Keahlian	%	90
Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	%	40
Meningkatnya perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	%	70

LAMPIRAN II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon III TAHUN 2022

OPD : Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

Tahun : 2022

Program	Kinerja		
	Indikator Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	%	15
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan Lowongan pekerjaan	%	50
Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan	%	90
	Persentase perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja (PP/PKB)	%	10
	Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan	%	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan baik	%	100

LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Eselon IV TAHUN 2022

OPD : Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

Tahun : 2022

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja		
		Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja/ calon tenaga kerja yang dilatih	Orang	409
	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang bekerjasama	Kali/Pertemuan	4
Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Lembaga	120
Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Dokumen/Orang	16

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja		
		Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
Program Penempatan Tenaga Kerja				
Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja/ calon pencari kerja yang mendapatkan bimbingan	Orang	50
	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah calon tenaga kerja/ tenaga kerja disabilitas yang dilayani	Orang	50
Pengelolaan informasi pasar kerja	Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	Jumlah aplikasi informasi pasar kerja yang dipergunakan	Aplikasi	1
	Job fair/Bursa Kerja	Jumlah lowongan kerja pada job fair/bursa kerja	Lowongan	100
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota	Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang mendapatkan pembinaan dan perlindungan	Orang	50
Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kota	Orang	25
Program Hubungan Industrial				
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah peraturan perusahaan bagi perusahaan yang disahkan	Perusahaan	50
	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perjanjian kerjasama bagi perusahaan yang didaftarkan	Perusahaan	50
	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah perusahaan yang didata	Perusahaan	150

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja		
		Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pencegahan kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Orang/Kasus	800
	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang ditangani	Orang	150
	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah perusahaan yang mempunyai serikat pekerja/serikat buruh	Perusahaan	400
	Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah Kabupaten/kota	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan LKS Tripartit	Kali	10
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya pengembangan dan optimalisasi pelaksanaan jaminan social tenaga kerja	Orang	200

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja		
		Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1
Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun	Tahun	1
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kali	15
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kali	2
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	75
Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	1
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 (satu) tahun	Tahun	1
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Tahun	1
	Penyediaan bahan/material	Tersedianya bahan/material	Tahun	1
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu pemerintah kota medan	Tahun	1
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat - rapat dan konsultasi selama 1 (satu) tahun)	Tahun	1
	Penatausahaan arsip dinamis dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Dokumen	200

Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja		
		Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya mebel	Tahun	1
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah tersedianya peralatan dan mesin	Tahun	1
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tahun	1
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik	Bulan	12
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi	Tahun	1
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tahun	1
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tahun	1
	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1

LAMPIRAN IV**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
YANG MENGACU PADA RPJMD KOTA MEDAN**

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

Tahun : 2021 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Akhir Periode RPJMD (%)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Persentase Pencari Kerja/ Tenaga Kerja yang Memperoleh Sertifikat Keahlian	89 %	90 %	92 %	93 %	94 %	95 %	95 %
2	Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	35 %	40 %	42 %	45 %	48 %	50 %	50 %
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	69 %	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	78 %

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA-BELANJA SKPD									
Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022																			
Organisasi : 2.07.0.00.0.00.02.0000 Dinas Ketenagakerjaan																			
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Jumlah		15				
													T-1	T				T+1	
														Belanja Operasi		Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer
														14 = (10+11+12+13)					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				15,958,716,616	425,508,100	0	0	16,384,224,716						
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,848,971,966	425,508,100	0	0	11,274,480,066						
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41,792,000	0	0	0	41,792,000						
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41,792,000	0	0	0	41,792,000						
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,520,853,506	0	0	0	8,520,853,506						
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,490,979,006	0	0	0	8,490,979,006						
2	07	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,874,500	0	0	0	29,874,500						
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				305,452,700	0	0	0	305,452,700						
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			152,122,500	0	0	0	152,122,500						
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			153,330,200	0	0	0	153,330,200						
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				476,785,700	400,000	0	0	477,185,700						
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82,000,000	0	0	0	82,000,000						
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000	0	0	0	130,000,000						
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			97,135,700	0	0	0	97,135,700						
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,000,000	400,000	0	0	9,400,000						
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,000,000	0	0	0	48,000,000						
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,750,000	0	0	0	91,750,000						
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,900,000	0	0	0	18,900,000						
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	425,108,100	0	0	425,108,100						
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	188,576,800	0	0	188,576,800						
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	236,531,300	0	0	236,531,300						

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,009,088,060	0	0	0	0	1,009,088,060	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9,550,000	0	0	0	0	9,550,000	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			360,162,000	0	0	0	0	360,162,000	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			639,376,060	0	0	0	0	639,376,060	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				495,000,000	0	0	0	0	495,000,000	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				2,034,311,200	0	0	0	0	2,034,311,200	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				1,963,800,100	0	0	0	0	1,963,800,100	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,422,487,000	0	0	0	0	1,422,487,000	
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			541,313,100	0	0	0	0	541,313,100	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				27,949,500	0	0	0	0	27,949,500	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,949,500	0	0	0	0	27,949,500	
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				42,561,600	0	0	0	0	42,561,600	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42,561,600	0	0	0	0	42,561,600	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				996,966,950	0	0	0	0	996,966,950	
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				294,679,350	0	0	0	0	294,679,350	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,479,350	0	0	0	0	66,479,350	

1	2	3	4	5	Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1		
									T-1	T						
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
									10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15		
2	07	04	2.01	04		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			228,200,000	0	0	0	228,200,000		
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						264,004,000	0	0	0	264,004,000	
2	07	04	2.03	01		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114,500,000	0	0	0	114,500,000		
2	07	04	2.03	03		Job Fair/Bursa Kerja (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			149,504,000	0	0	0	149,504,000		
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						339,735,000	0	0	0	339,735,000	
2	07	04	2.04	01		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			339,735,000	0	0	0	339,735,000		
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						98,548,600	0	0	0	98,548,600	
2	07	04	2.05	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98,548,600	0	0	0	98,548,600		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						2,078,466,500	0	0	0	2,078,466,500	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						250,500,000	0	0	0	250,500,000	
2	07	05	2.01	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			72,000,000	0	0	0	72,000,000		
2	07	05	2.01	02		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,000,000	0	0	0	45,000,000		
2	07	05	2.01	03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			133,500,000	0	0	0	133,500,000		
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						1,827,966,500	0	0	0	1,827,966,500	
2	07	05	2.02	01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			710,386,500	0	0	0	710,386,500		
2	07	05	2.02	02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			570,750,000	0	0	0	570,750,000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T				T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	0	0	0	100,000,000	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Ketenagakerjaan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				323,400,000	0	0	0	323,400,000	
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Dinas Ketenagakerjaan)					123,430,000	0	0	0	123,430,000	